

**AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI KORIDOR PUNCAK ANDALAS  
MELALUI SINERGI INFRASTRUKTUR, ENERGI TERBARUKAN,  
DAN HILIRISASI INDUSTRI**

**Khairil Anwar**

Fungsional Perencana Ahli Muda Pemerintah Kota Sungai Penuh

Email Korespondensi: irekbagong@gmail.com

**ABSTRACT**

The Puncak Andalas region is a geostrategic region in the central corridor of Sumatra connecting Jambi, West Sumatra, and Bengkulu Provinces, with complementary economic potential based on agriculture, plantations, maritime affairs, fisheries, tourism, trade, services, and energy. However, this region faces challenges such as low commodity added value, limited infrastructure connectivity, high logistics costs, and suboptimal utilization of New and Renewable Energy (NRE), reflecting the structural transformation of the economy and the still limited integration of value chains between regions. This paper aims to formulate policies for developing an economic corridor based on integrated downstreaming to encourage regional economic transformation. The method used is policy analysis with a qualitative and comparative descriptive approach, through the preparation of policy alternatives and assessment using the Bardach method. The results of the analysis indicate that the development of an integrated downstreaming corridor based on strengthening infrastructure connectivity and optimizing NRE is the most effective policy alternative. This policy emphasizes value chain integration, strengthening upstream-downstream linkages, and economic diversification through the division of functional roles between regions. Its implementation has the potential to increase commodity added value, reduce logistics costs, strengthen regional competitiveness, and encourage inclusive and sustainable economic growth.

**Keywords:** Economic transformation, Economic corridors, Integrated downstreaming.

**ABSTRAK**

Kawasan Puncak Andalas merupakan wilayah geostrategis di koridor tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu, dengan potensi ekonomi komplementer berbasis pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, pariwisata, perdagangan, jasa, dan energi. Namun, kawasan ini menghadapi tantangan berupa rendahnya nilai tambah komoditas, keterbatasan konektivitas infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang belum optimal, yang mencerminkan transformasi struktural ekonomi dan integrasi rantai nilai antar wilayah yang masih terbatas. Makalah ini bertujuan merumuskan kebijakan pengembangan koridor ekonomi berbasis hilirisasi terintegrasi untuk mendorong transformasi ekonomi regional. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan komparatif, melalui penyusunan alternatif kebijakan dan penilaian menggunakan metode *Bardach*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan koridor hilirisasi terintegrasi berbasis penguatan konektivitas infrastruktur dan optimalisasi EBT merupakan alternatif kebijakan paling efektif. Kebijakan ini menekankan integrasi rantai nilai, penguatan keterkaitan hulu-hilir, serta diversifikasi ekonomi melalui pembagian peran fungsional antar wilayah. Implementasinya berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas, menurunkan biaya logistik, memperkuat daya saing kawasan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Transformasi ekonomi, Koridor ekonomi, Hilirisasi terintegrasi.

## PENDAHULUAN

Koridor Puncak Andalas merupakan wilayah strategis yang mencakup Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin (Provinsi Jambi), Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan (Provinsi Sumatera Barat), serta Kabupaten Mukomuko (Provinsi Bengkulu). Secara geografis, kawasan ini menghubungkan wilayah pedalaman Bukit Barisan dengan pesisir barat Sumatera, sehingga memiliki potensi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi berbasis integrasi kawasan. Istilah Koridor Puncak Andalas dalam konteks ini digunakan sebagai pendekatan konseptual dalam analisis pembangunan, bukan sebagai entitas administratif formal.

Konfigurasi tersebut menunjukkan adanya peluang integrasi ekonomi berbasis rantai nilai antar wilayah, di mana keterkaitan antara wilayah produksi (*hinterland*), pusat pengolahan, dan kawasan distribusi pesisir dapat mendorong terbentuknya sistem ekonomi kawasan yang lebih efisien dan bernilai tambah tinggi. Dalam konteks ini, kawasan Puncak Andalas memiliki potensi untuk berkembang sebagai koridor ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, serta energi dalam satu sistem ekonomi yang saling mendukung.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, transformasi struktural dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi (Lewis, 1954). Namun, kondisi di Koridor Puncak Andalas menunjukkan bahwa proses tersebut belum berjalan optimal. Percepatan transformasi ekonomi kawasan menjadi imperatif strategis, terutama di wilayah perbatasan Sumatera bagian tengah, untuk menggeser paradigma pembangunan dari sekadar pertumbuhan menjadi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kewilayahan. Wilayah perbatasan tidak lagi dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan sebagai koridor ekonomi produktif dengan potensi hilirisasi komoditas unggulan (RPJPN 2025–2045).

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kawasan Puncak Andalas secara agregat (6 kabupaten/kota) menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021–2024. Pertumbuhan ekonomi kawasan sebesar 3,80% pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,73% pada tahun 2023, namun kembali melambat menjadi 4,37% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, di mana beberapa wilayah tumbuh lebih cepat sementara wilayah lain stagnan atau menurun, yang mengindikasikan bahwa integrasi ekonomi antar wilayah belum optimal dan pertumbuhan mengalami perlambatan. Temuan ini didukung oleh data pertumbuhan ekonomi daerah yang bersifat fluktuatif (BPS, 2025).

Pada aspek energi, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) masih rendah  $\pm 14,12\%$ , sedangkan bauran energi nasional masih didominasi energi fosil  $\pm 85,88\%$  (RPJPN 2025-2045). Keterbatasan energi andal dan terjangkau berdampak langsung pada minat investasi dan produktivitas industri, sehingga sektor bernilai tambah tinggi sulit berkembang.

Berdasarkan uraian konteks dan urgensi pembangunan kawasan, dapat diidentifikasi bahwa isu utama dalam pengembangan Koridor Puncak Andalas adalah Masih terbatasnya transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan terintegrasi antar wilayah di Koridor Puncak Andalas. Isu ini muncul sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer serta belum berkembangnya sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk memperdalam isu tersebut, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan utama berdasarkan data dan fakta empiris. Pertama, pertumbuhan ekonomi kawasan secara agregat menunjukkan tren yang fluktuatif dan belum merata antar wilayah, meningkat dari 3,80% pada tahun 2021 menjadi 4,73% pada tahun 2023, namun kembali melambat menjadi 4,37% tahun 2024 (BPS, 2025). Kedua, rendahnya diversifikasi dan hilirisasi industri pengolahan tercermin dari kontribusi sektor industri pengolahan (agregat) yang masih relatif rendah, yaitu sekitar 5,40% tahun 2024, diikuti pertumbuhan sektor industri pengolahan secara agregat yang mengalami perlambatan menjadi 2,66% tahun 2024 dari sebesar 4,58% tahun 2023, sementara sektor primer masih mendominasi hingga 39,35% tahun 2024 (BPS, 2025). Ketiga, keterbatasan infrastruktur menghambat konektivitas serta aktivitas produksi dan distribusi, berdampak

pada tingginya biaya logistik dan rendahnya daya saing kawasan. Data nasional menunjukkan waktu tempuh logistik rata-rata  $\pm 2,1$  jam/100 km (RPJPN 2025–2045) dan biaya logistik sekitar 25% dari penjualan industri (World Bank, 2016), sementara pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) masih sebesar 14,12% (RPJPN 2025–2045). Ketiga permasalahan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu lingkaran keterbatasan pembangunan, yang pada akhirnya memperlambat proses transformasi ekonomi kawasan secara menyeluruh.

Berdasarkan penelusuran penyebab hingga level terdalam, dapat diidentifikasi bahwa akar permasalahan utama terletak pada lambatnya distribusi barang dan tingginya biaya logistik yang merupakan konsekuensi dari belum memadainya infrastruktur pendukung industri. Kondisi ini pada akhirnya bermuara pada rendahnya diversifikasi dan hilirisasi industri pengolahan sebagai masalah utama kawasan. Berdasarkan temuan pendahuluan, pernyataan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: rendahnya diversifikasi dan hilirisasi industri pengolahan di Koridor Puncak Andalas disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendukung dan sistem distribusi yang belum efisien, sehingga menimbulkan tingginya biaya logistik, menghambat pengembangan industri berbasis nilai tambah, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan yang tidak merata dan daya saing wilayah yang masih rendah.

## METODE

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan komparatif untuk memahami konteks serta mengevaluasi dan membandingkan alternatif kebijakan. Penentuan prioritas masalah menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Selanjutnya, disusun alternatif kebijakan yang dinilai melalui metode skoring oleh *key person* berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kelayakan teknis, ekonomi dan pembiayaan, dukungan politik, serta kapasitas administrasi. Tahap akhir menggunakan pendekatan *logic model* untuk memastikan keterkaitan antara *input*, proses, *output*, *outcome*, dan dampak secara sistematis dan terukur (Bardach, 2012; Dunn, 2018; Prabawati et al., 2020).

## PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis permasalahan dan potensi Kawasan Puncak Andalas, dirumuskan tiga alternatif kebijakan strategis: (1) pendekatan berbasis infrastruktur, (2) pendekatan sektoral berbasis komoditas, dan (3) pendekatan integratif berbasis sistem ekonomi wilayah. Kawasan Puncak Andalas belum mengalami pergeseran signifikan menuju sektor bernilai tambah tinggi, yang merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Chenery & Syrquin, 1975; Rodrik, 2004). Kawasan ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sistem ekonomi regional berbasis koridor, karena posisi geografisnya strategis dan potensi sektoralnya saling melengkapi. Integrasi wilayah melalui peningkatan konektivitas dan penguatan keterkaitan ekonomi diyakini mampu mempercepat pertumbuhan kawasan (World Bank, 2018).

Alternatif 1 menitikberatkan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri dan ekonomi produktif, seperti jalan produksi, akses ke sentra komoditas, fasilitas logistik, dan infrastruktur distribusi. Fokus utama strategi ini adalah memperlancar arus barang dari wilayah produksi ke pasar serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi kendala pengembangan kawasan. Infrastruktur yang terhubung dengan aktivitas industri juga berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan akses pasar bagi pelaku usaha lokal (World Bank, 2018). Fokus utama strategi ini adalah memperlancar arus barang dari wilayah produksi ke pasar serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi kendala pengembangan kawasan.

Alternatif 2 menitikberatkan pada pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pembentukan klaster industri di wilayah produksi. Strategi ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat keterkaitan hulu-hilir, serta menciptakan lapangan kerja lokal. Pengembangan industri berbasis komoditas lokal merupakan langkah penting untuk mendorong pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder yang lebih produktif (Chenery & Syrquin, 1975;

Rodrik, 2004). Strategi ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat keterkaitan hulu-hilir, serta menciptakan lapangan kerja lokal. Selain itu, pendekatan klaster meningkatkan daya saing melalui aglomerasi ekonomi, efisiensi produksi, dan inovasi berbasis kedekatan geografis.

Alternatif 3 merupakan pendekatan integratif yang menggabungkan pembangunan infrastruktur pendukung industri, integrasi ekonomi, dan pengembangan sistem multi-koridor wilayah. Strategi ini tidak hanya fokus pada konektivitas fisik atau sektor ekonomi secara parsial, tetapi pada keterkaitan sistemik antar wilayah dan antar sektor. Pendekatan multi-koridor memungkinkan terbentuknya jaringan ekonomi regional berbasis simpul pertumbuhan (*growth poles*) yang saling terhubung dan saling melengkapi, seperti pusat produksi, distribusi, dan jasa. Interaksi antar simpul ini akan menghasilkan efek pengganda yang mendorong pertumbuhan wilayah secara luas (Perroux, 1950; World Bank, 2018).

**Tabel 1: Analisis Metode Bardach dalam Pemilihan Alternatif Kebijakan**

Alternatif	Kemampuan Teknis	Kelayakan Ekonomi & Pembiayaan	Dukungan Politik	Kapasitas Administrasi	Total Skor
Alternatif 1 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri dan ekonomi produktif	4	4	4	4	16
Alternatif 2 Pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pembentukan klaster industri di wilayah produksi	4	3	4	4	15
Alternatif 3 Pembangunan infrastruktur pendukung industri, integrasi ekonomi, dan pengembangan sistem multi-koridor wilayah	4	5	5	4	18

Sumber: Hasil analisis, 2026

Penilaian tiga alternatif kebijakan dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kemampuan teknis, kelayakan ekonomi dan pembiayaan, dukungan politik, serta kapasitas administrasi, sesuai literatur analisis kebijakan publik (Bardach, 2012; Dunn, 2018). Kemampuan teknis mencerminkan kesiapan SDM, teknologi, dan infrastruktur; kelayakan ekonomi menilai efisiensi biaya-manfaat serta keberlanjutan pembiayaan; dukungan politik menunjukkan tingkat penerimaan pemangku kepentingan; dan kapasitas administrasi menggambarkan kemampuan kelembagaan dalam implementasi dan pengawasan kebijakan. Keempat kriteria ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya konseptual, tetapi juga realistis, layak, dan implementatif (Prabawati, Rahaju, & Kurniawan, 2020).

Beberapa alternatif kebijakan telah dianalisis untuk menentukan strategi yang paling efektif dalam mendorong transformasi ekonomi regional. Alternatif 1 terbatas oleh infrastruktur dan akses pasar, sementara alternatif 2 cenderung belum mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi secara terpisah tidak cukup untuk mencapai transformasi ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan di Koridor Puncak Andalas.

Alternatif 3 muncul sebagai solusi integratif, menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam satu kerangka kebijakan terpadu. Alternatif ini tidak hanya memperkuat infrastruktur dan konektivitas fisik antar wilayah, tetapi juga mendorong penguatan sektor ekonomi melalui pengembangan hilirisasi komoditas, investasi industri, dan kapasitas ekspor. Pendekatan integratif ini memastikan bahwa pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial berjalan bersamaan, menciptakan sinergi antara simpul-simpul pertumbuhan kawasan, serta meminimalkan risiko ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah.

Secara teori pembangunan, pendekatan Alternatif 3 selaras dengan prinsip transformasi struktural (Chenery & Syrquin, 1975), yang menekankan perubahan komposisi sektor ekonomi dari primer ke sekunder dan tersier, serta peningkatan nilai tambah komoditas. Integrasi multi dimensi ini memungkinkan Kawasan Puncak Andalas untuk tidak hanya meningkatkan *output* ekonomi, tetapi juga memperbaiki struktur ekonomi kawasan agar lebih berkelanjutan, produktif, dan berorientasi pasar global.

Literatur internasional mendukung pendekatan ini, World Bank (2018) menekankan pentingnya integrasi infrastruktur dan sektor ekonomi untuk memperkuat pertumbuhan regional, sementara ADB (2017) menunjukkan bahwa pengembangan multi-koridor yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir dapat meningkatkan perdagangan, investasi, dan kesempatan kerja. OECD (2025) menambahkan bahwa integrasi pembangunan dengan prinsip *green growth* meminimalkan risiko lingkungan, menjaga kelestarian sumber daya, dan mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Dari sisi implementasi, Alternatif 3 menekankan pengembangan sistem multi-koridor yang terstruktur dan terintegrasi, yang menghubungkan seluruh simpul pertumbuhan di Kawasan Puncak Andalas dalam satu jaringan ekonomi kawasan. Struktur ini tidak hanya menekankan konektivitas fisik, tetapi juga integrasi fungsional antara produksi, hilirisasi, dan distribusi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan berbasis wilayah (*place-based development*) yang menekankan pemanfaatan potensi spesifik tiap wilayah dalam kerangka keterhubungan antar wilayah (OECD, 2025). Lebih lanjut, integrasi antar koridor menciptakan efek limpahan ekonomi (*spillover effect*), di mana pertumbuhan di satu wilayah dapat mendorong aktivitas ekonomi di wilayah lain. Dalam perspektif pembangunan regional, keterkaitan ini menjadi kunci dalam memperkuat efisiensi ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah (Krugman, 1991; OECD, 2025). Dengan adanya keterhubungan yang kuat, aktivitas produksi, pengolahan, dan distribusi dapat berlangsung lebih efisien, sehingga meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, Alternatif 3 menghasilkan transformasi ekonomi kawasan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Integrasi antar koridor dan antar simpul pertumbuhan menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas dan memperluas akses pasar, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi kawasan serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Berdasarkan hal tersebut, Kawasan Puncak Andalas memiliki potensi untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis integrasi, spesialisasi, dan konektivitas yang kuat.

Pembangunan infrastruktur tanpa keterkaitan dengan sistem produksi dan distribusi hanya menghasilkan konektivitas fisik tanpa dampak ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pandangan World Bank (2018) yang menekankan bahwa efektivitas infrastruktur sangat ditentukan oleh keterhubungannya dengan aktivitas ekonomi produktif. Di sisi lain, pendekatan berbasis komoditas juga menghadapi keterbatasan apabila tidak didukung oleh sistem logistik dan pasar yang terintegrasi.

Dalam kerangka tersebut, pendekatan multi-koridor menjadi solusi strategis karena mampu mengintegrasikan dimensi spasial dan sektoral dalam satu sistem ekonomi wilayah. Konsep ini sejalan dengan teori *simpul pertumbuhan* (*growth poles*) yang dikembangkan oleh François Perroux (1950), yang menekankan pentingnya pusat-pusat pertumbuhan sebagai motor penggerak ekonomi regional. Selain itu, teori ekonomi spasial dari Paul Krugman (1991) menunjukkan bahwa keterkaitan antar wilayah dapat menciptakan efek aglomerasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang direkomendasikan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga bertujuan melakukan rekayasa struktur ekonomi kawasan secara sistemik melalui integrasi wilayah, penguatan rantai nilai, dan optimalisasi konektivitas.

Sasaran kebijakan dirumuskan dalam empat dimensi utama. Pertama, dari sisi struktur ekonomi, kawasan diharapkan mengalami pergeseran dari dominasi sektor primer menuju sektor industri pengolahan dan jasa, sejalan dengan teori transformasi struktural yang menekankan pentingnya peningkatan nilai

tambah dalam pembangunan ekonomi (Chenery & Syrquin, 1975; Todaro & Smith, 2012). Kedua, dari sisi konektivitas, diharapkan terwujud sistem transportasi dan logistik yang efisien sehingga menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi pasar (World Bank, 2018; Asian Development Bank, 2017; OECD 2025). Ketiga, dari sisi keterkaitan ekonomi, terbentuk rantai nilai komoditas unggulan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing kawasan berbasis klaster industri (Porter, 1990). Keempat, dari sisi kelembagaan, terbentuk tata kelola kawasan yang mampu mengoordinasikan pembangunan lintas wilayah secara efektif, sebagaimana ditekankan dalam analisis kebijakan publik terkait pentingnya kapasitas institusi dan koordinasi antar aktor (Dunn, 2018; Bardach, 2012). Kebijakan ini dirancang sebagai kebijakan pengaturan yang mengarahkan pembangunan kawasan secara sistemik.

Kawasan Puncak Andalas dikonstruksikan sebagai sistem ekonomi berbasis jaringan (*network-based regional system*), yang menekankan integrasi spasial (*spatial integration*) dan spesialisasi fungsional (*functional specialization*). Setiap wilayah memiliki peran ekonomi spesifik yang saling melengkapi, membentuk ekosistem ekonomi regional yang kohesif, adaptif, dan berdaya saing (OECD, 2025; World Bank, 2018; Chenery & Syrquin, 1975).

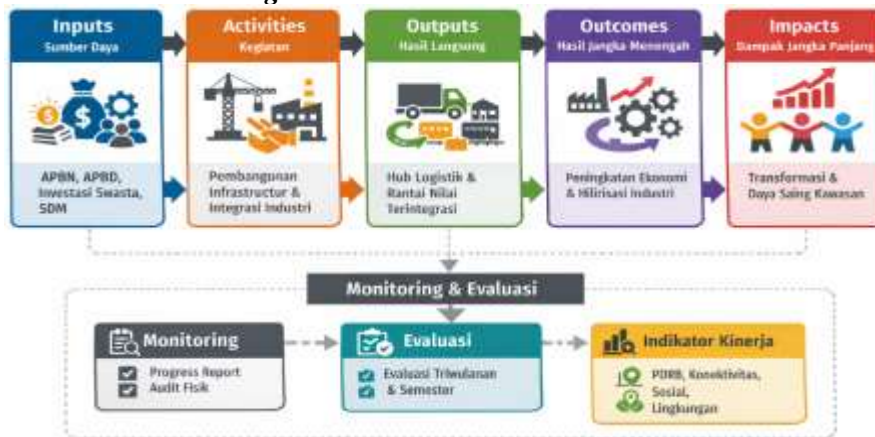
Kota Sungai Penuh berperan sebagai simpul inti sekaligus hub logistik kawasan, mengoordinasikan perdagangan, jasa, dan distribusi komoditas unggulan dari kabupaten sekitarnya yang didukung pariwisata. Kota ini juga menjadi pusat hilirisasi lanjutan yang memastikan keterkaitan antara produksi, pengolahan, dan distribusi berjalan efisien. Hilirisasi di Kota Sungai Penuh tidak diarahkan pada industri manufaktur berat yang mengekstraksi bahan mentah, melainkan pada aspek *industrial engineering* dan jasa penunjang industri. Ini mencakup digitalisasi rantai pasok (*traceability*), *branding* kawasan Puncak Andalas, serta pusat inkubasi bisnis agar produk sekunder daerah mampu menembus pasar tersier (ekspor dan retail modern). Kota Sungai Penuh difokuskan pada Efisiensi Rantai Pasok: (1) Konsolidasi logistik: Menjadi pusat pengumpulan produk sekunder dari 6 kabupaten untuk dikemas ulang (*re-packaging*) dengan standar retail modern sebelum dikirim ke Pelabuhan Teluk Bayur atau diekspor melalui Bandara Depati Parbo dan (2) Gudang Penyangga (*Warehouse*) digital: Pembangunan pergudangan dengan sistem *cold storage* bertenaga surya/EBT untuk menjaga kesegaran komoditas perikanan dari Pesisir Selatan dan Mukomuko sebelum didistribusikan ke wilayah Jambi bagian barat.

Kabupaten Kerinci berfokus sebagai basis produksi primer (*production base*) dan penyedia energi, dengan penguatan pada hilirisasi tahap awal (*primary processing*) komoditas kopi dan kayu manis. Kabupaten Merangin diarahkan pada pengembangan Agroindustri Terintegrasi yang mendukung pariwisata *geopark* serta penguatan rantai pasok ke pusat distribusi. Kabupaten Solok Selatan diposisikan sebagai basis produksi pertanian dan perkebunan yang didukung oleh Industrialisasi berbasis energi bersih (*green industry*) memanfaatkan potensi panas bumi (PLTP). Di wilayah pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan mengoptimalkan potensi ekonomi biru (*blue economy*) melalui sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari, sekaligus memperkuat konektivitas menuju gerbang ekspor. Kabupaten Mukomuko berperan strategis sebagai basis perkebunan dan simpul hilirisasi akhir (*final processing*) komoditas unggulan. Saat ini, aktivitas ekspor kawasan masih terkonsentrasi melalui Pelabuhan Teluk Bayur sebagai gerbang utama (*main gateway*) untuk menjaga efisiensi logistik.

Ke depan, pengembangan infrastruktur pelabuhan di Mukomuko diarahkan untuk membentuk fungsi sebagai gerbang ekspor baru (*alternative gateway*). Transformasi ini bertujuan untuk mereduksi ketergantungan pada satu titik keluar, memperpendek rantai logistik (*supply chain*), serta menciptakan efisiensi biaya dan waktu distribusi secara signifikan. Dalam kerangka ini, Kota Sungai Penuh tetap memegang peran sentral sebagai pusat konsolidasi dan pengendali rantai nilai (*value chain controller*) yang menyeimbangkan arus barang antara wilayah pedalaman dan pesisir. Dengan demikian, sistem ekonomi Kawasan Puncak Andalas berkembang sebagai jaringan multi-simpul yang terintegrasi, dengan aliran produksi, hilirisasi berjenjang, dan distribusi yang semakin efisien, sehingga mampu memperkuat daya saing kawasan dan mendorong pemerataan pembangunan.

Distribusi arus ekonomi dikonsentrasikan melalui Kota Sungai Penuh sebagai pusat logistik utama yang menghubungkan wilayah produksi dengan simpul hilirisasi serta jalur distribusi ke wilayah pesisir, terutama Kabupaten Pesisir Selatan dan Mukomuko. Integrasi ini menciptakan arus ekonomi yang dinamis dan efisien, sekaligus memicu efek limpahan ekonomi (*spillover effect*), di mana pertumbuhan di satu wilayah merangsang aktivitas ekonomi di wilayah lain, sejalan dengan konsep aglomerasi dan keterkaitan ekonomi regional.

Gambar 1: Logic Model Transformasi Ekonomi Kawasan



Sumber: Hasil analisis, 2026

Pembangunan multi-koridor didukung oleh APBN, APBD, investasi swasta, SDM, regulasi, dan kelembagaan koordinatif. Dukungan ini mendorong pembangunan infrastruktur dan logistik, integrasi industri hilir, penguatan distribusi, serta koordinasi lintas wilayah, yang menghasilkan sistem logistik efisien dan rantai nilai terintegrasi. Dampaknya berupa peningkatan efisiensi ekonomi, pertumbuhan industri dan jasa, serta hilirisasi berjenjang yang berujung pada transformasi ekonomi kawasan, pemerataan, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Seluruh proses dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar tetap adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Keberhasilan pembangunan multi-koridor sangat ditentukan oleh efektivitas tata kelola berjenjang (*multi-level governance*) yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan arah kebijakan strategis dan dukungan pembiayaan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab pada implementasi dan koordinasi lintas wilayah. Di sisi lain, sektor swasta mendorong investasi dan inovasi, serta masyarakat berperan sebagai pelaku ekonomi lokal. Untuk memastikan integrasi berjalan efektif, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan lembaga koordinasi kawasan (*regional coordination body*) yang berfungsi menyinergikan perencanaan, mencegah tumpang tindih kebijakan, serta mendukung monitoring dan evaluasi yang sistematis dan adaptif.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah dan panjang. Pada tahap jangka pendek (0–2 tahun), fokus diarahkan pada penetapan kawasan strategis, penyusunan masterplan, serta penguatan regulasi dan kelembagaan. Tahap jangka menengah (3–5 tahun) difokuskan pada pembangunan infrastruktur, integrasi sistem ekonomi antar wilayah, serta penguatan konektivitas untuk meningkatkan efisiensi logistik. Selanjutnya, tahap jangka panjang (6–15 tahun) diarahkan pada transformasi ekonomi berbasis industri hilir, peningkatan daya saing global, serta penguatan kapasitas ekspor. Pendekatan bertahap ini memungkinkan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan secara adaptif.

Dari sisi pembiayaan, pembangunan kawasan multi-koridor menggunakan pendekatan blended financing melalui kombinasi APBN, APBD, investasi swasta, dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). APBN difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, APBD mendukung

program lokal, sementara sektor swasta berperan penting dalam pengembangan industri hilir, energi terbarukan, dan inovasi teknologi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pembiayaan, tetapi juga memperluas partisipasi swasta, memperkuat keberlanjutan fiskal, serta meningkatkan potensi pengembalian investasi kawasan.

Dalam implementasinya, pembangunan multi-koridor juga memerlukan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Risiko kelembagaan diatasi melalui penguatan koordinasi kawasan dan sistem monitoring yang transparan. Risiko pembiayaan diminimalkan melalui diversifikasi sumber dana dan pengembangan skema KPBU. Risiko teknis ditangani melalui pembangunan infrastruktur prioritas, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, risiko sosial-politik diantisipasi melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, serta risiko lingkungan dikelola melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi terbarukan. Dengan demikian, pendekatan manajemen risiko ini memastikan bahwa pembangunan multi-koridor dapat berlangsung secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Keberhasilan transformasi ekonomi melalui sinergi infrastruktur, hilirisasi industri, dan energi terbarukan di Koridor Puncak Andalas diukur menggunakan indikator kinerja utama yang komprehensif. Indikator ini menilai kemajuan daya saing, konektivitas dan penataan ruang, hilirisasi industri, perdagangan dan jasa, penerapan ekonomi hijau dan biru, pengembangan pariwisata, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas lingkungan dan resiliensi terhadap perubahan iklim.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan struktural, potensi wilayah, serta hasil evaluasi alternatif kebijakan menggunakan pendekatan *Bardach*, direkomendasikan kebijakan utama berupa pengembangan sistem ekonomi regional berbasis sinergi infrastruktur, integrasi ekonomi, dan multi-koridor di Kawasan Puncak Andalas. Rekomendasi ini bukan sekadar hasil pemilihan alternatif dengan skor tertinggi, melainkan merupakan konsekuensi logis dari kebutuhan untuk mengatasi permasalahan kawasan yang bersifat sistemik, yaitu dominasi sektor primer dengan nilai tambah rendah, dan belum optimalnya konektivitas yang mendukung aktivitas ekonomi produktif.

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kawasan yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing tinggi. Secara substantif, tujuan kebijakan mencakup peningkatan efisiensi ekonomi melalui integrasi sistem produksi dan distribusi, percepatan transformasi struktural menuju sektor bernilai tambah tinggi, serta penguatan daya saing kawasan dalam konteks ekonomi regional dan nasional. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan berbasis konektivitas dan keterkaitan ekonomi (World Bank, 2018; OECD, 2025).

Penetapan Koridor Puncak Andalas sebagai kawasan strategis ekonomi lintas provinsi menjadi langkah awal yang krusial untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan prioritas pembangunan. Dalam praktiknya, kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi perencanaan pembangunan agar tercipta keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, sebagaimana tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menekankan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah (RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025–2029).

Sistem multi-koridor di Kawasan Puncak Andalas membentuk rantai nilai regional terintegrasi (*integrated regional value chain*) yang bersifat tersebar dan saling terhubung antar wilayah, bukan linear. Proses hilirisasi berkembang secara berjenjang dan multi-simpul (*multi-node*), menyesuaikan kapasitas dan keunggulan masing-masing wilayah. Pendekatan multi-koridor menjadi krusial untuk memperkuat integrasi antar simpul hilirisasi yang telah ada. Melalui penguatan konektivitas, integrasi logistik, dan sinkronisasi pengembangan industri, pusat-pusat produksi, pengolahan, dan distribusi dapat dihubungkan dalam satu sistem ekonomi yang terkoordinasi (*coordinated economic system*). Implementasi kebijakan multi-koridor dalam kerangka tersebut menghasilkan implikasi strategis yang bersifat multidimensional dan transformatif.

Dari perspektif ekonomi, pendekatan ini tidak sekadar menciptakan pusat pertumbuhan baru, tetapi secara sistematis mendorong transformasi struktur ekonomi kawasan. Hilirisasi komoditas unggulan menjadi kunci dalam menggeser dominasi sektor primer menuju sektor industri pengolahan dan jasa bernilai tambah tinggi. Proses ini meningkatkan produktivitas, memperluas basis investasi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Sebagai konsekuensinya, kebijakan multi-koridor berfungsi sebagai katalis transformasi struktural yang memperkuat daya saing kawasan dalam jangka panjang.

Dari sisi sosial, integrasi multi-koridor memperluas keterlibatan masyarakat dalam sistem ekonomi kawasan melalui penguatan rantai nilai lokal. Distribusi manfaat pembangunan menjadi lebih merata karena keterkaitan antar wilayah memungkinkan setiap simpul ekonomi berkontribusi secara optimal. Hal ini berdampak langsung pada penurunan kesenjangan regional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan inklusivitas pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam dimensi lingkungan, pendekatan multi-koridor menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan. Integrasi antara pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan energi yang lebih efisien memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan. Penguatan sektor energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Dari aspek efisiensi dan integrasi, kebijakan multi-koridor menciptakan sistem ekonomi kawasan yang terkoordinasi secara struktural, di mana produksi, hilirisasi, dan distribusi terhubung dalam satu jaringan yang kohesif. Integrasi ini tidak hanya memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional dan internasional, tetapi juga mendorong terbentuknya aglomerasi ekonomi di titik-titik strategis. Konsentrasi kegiatan ekonomi meningkatkan efisiensi, menekan biaya transaksi, dan memperkuat daya saing kawasan.

Secara keseluruhan, kebijakan multi-koridor di Kawasan Puncak Andalas merupakan strategi transformasi ekonomi kawasan yang bersifat sistemik, integratif, dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta membangun ketahanan kawasan terhadap dinamika global dan risiko pembangunan. Dengan demikian, Kawasan Puncak Andalas memiliki potensi untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, kunci dari keberhasilan transformasi kawasan terletak pada kemampuan mengintegrasikan seluruh potensi dan fungsi wilayah dalam satu sistem yang terhubung. Pendekatan multi-koridor menjadi instrumen utama dalam mewujudkan integrasi tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Al-Ababneh, H. A., Dumanska, I. Y., Derkach, E. M., Sokhetska, A. V., & Kemarska, L. H. 2024. *Integration of Logistics Systems of Developing Countries into International Logistics Channels*. International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), 24(7), 87-?. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2024.24.7.11>
- Asian Development Bank. 2017. *Meeting Asia's Infrastructure Needs*. Manila: ADB.
- Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Sungai Penuh menurut lapangan usaha 2020–2024*. BPS Kota Sungai Penuh.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kerinci menurut lapangan usaha 2020–2024*. BPS Kabupaten Kerinci.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Merangin menurut lapangan usaha 2020–2024*. BPS Kabupaten Merangin.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten*

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

34

Indexed



SINTA 4



- Pesisir Selatan menurut lapangan usaha 2020–2024*. BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan menurut lapangan usaha 2020–2024*. BPS Kabupaten Solok Selatan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mukomuko menurut lapangan usaha 2020–2024*. BPS Kabupaten Mukomuko.
- Bappenas, & ERIA. 2021. *Kajian Sektor Manufaktur Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) & Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
- Bappenas. 2024. *RPJPN 2025–2045: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. 2025. *RPJMN 2025–2029: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bardach, E. 2012. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (4th ed.)*. Berkeley, CA: Richard and Rhoda Goldman School of Public Policy, University of California, Berkeley: CQ Press/SAGE Publications.
- Chenery, H.B., & Syrquin, M. 1975. *Patterns of Development, 1950–1970*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. Routledge. Diakses dari <https://www.routledge.com/Public-Policy-Analysis-An-Integrated-Approach/Dunn/p/book/9781315181226>
- Economics Online. 2026. *Agglomeration Economies*. Retrieved March 25, 2026, Diakses dari <https://www.economicsonline.co.uk/definitions/agglomeration-economies.html/>
- Febri Hendri Antoni Arif. 2025. *Strategi Hilirisasi Industri untuk Peningkatan Nilai Tambah*. Paparan, Kementerian Perindustrian RI.
- Hirschman, A. O. 1958. *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press. Diakses dari [https://www.academia.edu/1838803/The\\_strategy\\_of\\_economic\\_development](https://www.academia.edu/1838803/The_strategy_of_economic_development).
- IEA. 2021. *World Energy Outlook 2021*. Paris: IEA Publications.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Krugman, P. 1991. *Geography and Trade*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Lewis, W. A. 1954. *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. Manchester School of Economic and Social Studies, 22(2), 139–191. Diakses dari <https://docslib.org/doc/1043311/economic-development-with-unlimited-supplies-of-labour-1954>
- Musianapedia. 2025. *Puncak Andalas: Calon Provinsi Baru yang Siap Mengguncang Sumatera dengan Potensinya!*. Musianapedia – Pikiran-Rakyat. <https://musianapedia.pikiran-rakyat.com/kabar-nasional/pr-2268997811/puncak-andalas-calon-provinsi-baru-yang-siap-mengguncang-sumatera-dengan-potensinya?page=all>
- OECD. 2025. *Implementing Regional Development Strategies*. Paris: OECD Publishing.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. 2024. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh 2024–2044*. Sungai Penuh: Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. 2024. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh 2025–2045*. Sungai Penuh: Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. 2025. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh 2025–2029*. Sungai Penuh: Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- Pemerintah Kota Sungai Penuh. (n.d.). *Sejarah Kota Sungai Penuh*. <https://sungaipenuhkota.go.id/index.php/profil/sejarah>
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang *Kebijakan Energi Nasional*.
- Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang *Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera*,

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

- terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Perroux, F. 1950. *Economic Space: Theory and Applications. The Quarterly Journal of Economics*, 64(1), 89–104
- Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations. Free Press.* Diakses dari <https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations>
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. 2020. *Analisis Kebijakan Publik.* Surabaya: UNESA University Press. ISBN 978-602-449-473-5.
- Rodrik, D. 2004. *Industrial Policy for The Twenty-First Century.* Cambridge, MA: Harvard University.
- Rodrik, D. 2016. *Premature Deindustrialization.* *Journal of Economic Growth* 21, 1–33.
- Rosenstein-Rodan, P.N. 1943. *Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe.* *The Economic Journal*, 53(210/211), 202–211.
- Stern, D. I. 2010. *The Role of Energy in Economic Growth* (USAEI-IAEE Working Paper No. 10-055). Canberra, Australia: Australian National University.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. 2012. *Economic Development (11th ed.).* Boston: Pearson.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang *Jalan.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang *Energi.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- W.K. Kellogg Foundation. 2004. *Logic Model Development Guide.* Battle Creek, MI: W.K. Kellogg Foundation.
- World Bank. 2016. *Indonesia: \$400 Million Approved for Logistics Reform.* The World Bank. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/11/02/indonesia-400-million-approved-for-logistics-reform>
- World Bank. 2017. *Mobilizing Finance for Development.* Washington, DC: World Bank.
- World Bank. 2018. *Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy.* Washington, DC: World Bank.
- World Bank. 2023. *Indonesia's economic growth to ease slightly in 2024 as commodity prices soften.* The World Bank. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/12/13/indonesia-economic-growth-to-ease-slightly-in-2024-as-commodity-prices-soften>